

MANAJEMEN MUTU TERPADU PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEBAGAI BIDANG GARAP MANAJEMEN PENDIDIKAN

JB. Suhatmaji Sunaryo, Ag. Sri Purnami, Rahmat Mulyono
SMA Negeri 1 Sedayu, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa

gandungdw@gmail.com, purnami@ustjogja.ac.id, rahmat.mulyono@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

Integrated Quality Management in the field of education is a management that has the aim of improving the quality of education in the institution, improving the quality of graduates from school institutions by increasing the intellectual, emotional and character aspects of the graduates. Apart from graduates who are working on Integrated Quality Management, there is another field that is working on Integrated Quality Management, namely Financing. Financing is an important part of management, because without financing all activities in the institution will not run perfectly. This research uses a type of literature study on all journal articles that discuss financing in the field of education, so that the importance of financing in education can be seen. The results of the research that have been achieved are the process of planning, implementing and monitoring financing in educational institutions, the end result of which is that the goals to be achieved can be realized well.

Keywords: *Integrated Quality Management, Financing, Education*

ABSTRAK

Manajemen Mutu Terpadu dalam bidang pendidikan merupakan suatu manajemen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaganya, meningkatkan mutu lulusan dari lembaga sekolahnya dengan adanya peningkatan dalam segi intelektualnya, emosionalnya dan karakter dari lulusannya. Selain dari lulusan yang menjadi bidang garap dari Manajemen Mutu Terpadu, ada bidang yang menjadi bidang garap dari Manajemen Mutu Terpadu, yaitu Pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian penting dari suatu manajemen, karena tanpa ada pembiayaan semua kegiatan di lembaga tidak akan berjalan dengan sempurna. Dalam penelitian ini menggunakan jenis studi literatur terhadap semua artikel jurnal yang membahas tentang pembiayaan dalam bidang pendidikan, sehingga dapat diketahui pentingnya pembiayaan dalam pendidikan. Hasil dari penelitian yang telah dicapai yaitu adanya proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari pembiayaan di lembaga pendidikan yang hasil akhirnya adalah tujuan yang akan dicapai dapat diwujudkan dengan baik.

Kata kunci: Manajemen Mutu Terpadu, Pembiayaan, Pendidikan

A. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat yang telah tertuang didalam konstitusi negara (UUD). Pasal 31(1) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan: Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tujuannya ialah, agar pendidikan merupakan hak mutlak setiap warga negara untuk belajar di

negara ini pada tingkat dasar dan menengah sampai dengan universitas agar kelak dapat mempunyai kehidupan yang sejahtera. melalui pendidikan ini, diharapkan menjadi upaya pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan dan siap menghadapi persaingan di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mutu pendidikan meliputi masukan, proses, keluaran dan hasil. Masukan pendidikan dinyatakan bermutu apabila dilaksanakan sesuai dengan standar minimal nasional bidang pendidikan. Proses pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, kreatif, inovatif dan menarik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Hasil dikatakan berkualitas apabila hasil belajar yang dicapai peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik tinggi.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan yang terjadi pada lembaga pendidikan terkait pendanaan pendidikan antara lain keterbatasan dana, terhambatnya pendanaan program, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan yang dituangkan dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Pemerataan pendidikan untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan proses pendidikan yang salah satunya melalui pembelajaran.

Analisis data dalam artikel ini menggunakan metode analisis data Induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta khusus sebelum sampai pada kesimpulan umum, dan menggunakan Metode analisis komparatif yaitu dengan melihat dua atau lebih objek yang mirip satu sama lain untuk

menentukan perbedaan dan kesamaan mereka.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang mencari semua artikel ilmiah tentang pembiayaan pendidikan dan menjadikannya sebuah kesimpulan tentang pembiayaan dalam dunia pendidikan, waktu penelitian dimulai dari juli sampai dengan november 2023

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

Waktu dan Tempat Penelitian

Menggunakan studi literatur, pada jurnal yang mempunyai judul tentang manajemen pembiayaan pendidikan dilakukan dari bulan juli sampai dengan bulan november 2023.

Target/Subjek Penelitian

Target dari penelitian ini mendapatkan semua artikel jurnal yang membahas tentang pembiayaan pendidikan sebanyak 20 artikel jurnal.

Prosedur

Prosedur dalam penelitian ini adalah menyimpulkan dalam satu jurnal yang mempunyai pembahasan tentang pembiayaan pendidikan, kemudian semua jurnal dirangkum sehingga menjadi sebuah jurnal yang baru tentang manajemen mutu terpadu tentang pembiayaan pendidikan.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data adalah semua artikel jurnal tentang manajemen mutu terpadu pembiayaan pendidikan dan teknik pengumpulan data dengan cara library research yaitu dengan mencari

jenis jurnal yang sesuai dengan tema yang akan dibuat dan diambil kesimpulan secara menyeluruh sehingga terdapat kesimpulan dari sejumlah artikel jurnal yang telah diteliti ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan menggunakan analisis data analisis data Induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta khusus sebelum sampai pada kesimpulan umum dan menggunakan Metode analisis komparatif yaitu dengan melihat dua atau lebih objek yang mirip satu sama lain untuk menentukan perbedaan dan kesamaan mereka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanpa adanya biaya, maka pendidikan tidak akan berhasil. Untuk melaksanakan proses pembelajaran, Madrasah Aliyah Al-Manar Medan Johor mendapatkan dana dari masyarakat. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan pembiayaan sekolah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Manar dalam beberapa dimensi: (1) perencanaan, yang mencakup pengumpulan dan pengolahan data, diagnosa, perumusan kebijakan, estimasi kebutuhan, penganggaran kebutuhan dana dan pemilihan tujuan; (2) merumuskan rencana, (3) memberikan detail rencana, (4) menerapkan rencana, dan (5) mengubah dan melakukan perencanaan setelahnya. Kepala Madrasah Aliyah Al-Manar Medan memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan telah

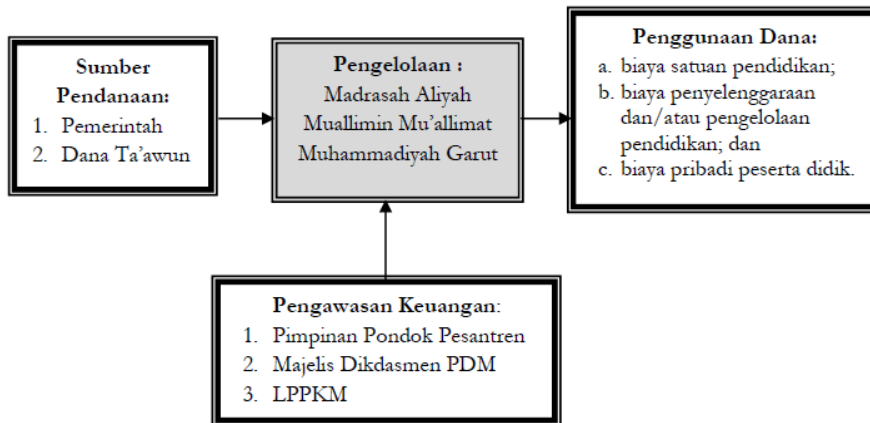
diselesaikan dan dilaksanakan. RAPBM digunakan di Madrasah Aliyah Al-Manar Medan untuk memantau penggunaan biaya pendidikan. Kepala Madrasah Aliyah Al-Manar di Medan mengelola dana pendidikan dengan baik. Kepala Madrasah Aliyah Al-Manar Medan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk melanjutkan perkuliahan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti pendidik yang diizinkan kuliah S2 dan S3. Guru juga didorong untuk mengikuti berbagai macam pelatihan, seperti seminar dan MGMP. (Mesiono et al., 2021)

Berdiri pada tahun 1998, Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut berada di lingkungan Pesantren Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut dan diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut. Menurut Ketentuan Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 09/KTN /I.4/F/2013 tentang Dana Ta'awun di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, pasal 1 :

(1) Dana Ta'awun adalah akumulasi dari infaq dari siswa, guru, karyawan, pimpinan, orang tua siswa, dan masyarakat. (2) Infaq siswa adalah uang yang diperoleh oleh siswa di lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah; (3) Infaq guru adalah uang yang diperoleh oleh guru di lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah; (4) Infaq karyawan adalah uang yang diperoleh oleh karyawan di lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah; (5) Infaq pimpinan adalah uang yang diperoleh oleh kepala, mudir, wakil kepala, dan wakil mudir; (6) Infaq orang tua siswa dan masyarakat adalah uang yang

dikumpulkan oleh orang tua siswa dan masyarakat dan digunakan untuk Dana Pembangunan dan Pengembangan (DPP) pendidikan di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. (7) Pengelolaan Dana Ta'awun adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengatur,

mendistribusikan, dan menangani infaq yang diberikan oleh sekolah atau Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah di semua tingkatan. Berikut ini adalah diagram model pembiayaan pendidikan MA Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut:



Gambar 1. Alur model pembiayaan pendidikan Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut

Meskipun Madrasah Alaiyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut belum menggunakan model pembiayaan pendidikan berbasis dana ta'awun secara efektif, implementasi manajemen pembiayaan pendidikan belum memungkinkan penggunaan dana ta'awun sebagai sumber dana pendidikan yang kaya, melimpah, dan bertahan lama.(Musthafa, 2017)

Menurut Nanang Fattah (2019), yang dikutip oleh Nursalimah, biaya pendidikan adalah upaya untuk mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Biaya pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan di sekolah atau madrasah. Menurut Nanang Fattah (2019), seperti dikutip oleh Nursalimah, efisiensi pendidikan berarti ada hubungan antara

pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas untuk mencapai optimalisasi yang tinggi, menurut Didi Sapradi (2010). Dalam hal efisiensi, ada dua kategori: internal dan eksternal.(Nursalimah, 2022)

Manajemen pembiayaan Madrasah Aliyah Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai didasarkan pada kekeluargaan, efektif, efisien, produktif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan tentang rancangan anggaran pembiayaan sekolah diberikan kepada Ketua Yayasan, kepala madrasah, dan direktur sekolah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu dengan pola hirarki kea atas kepada Ketua Yayasan.

Pendidikan dapat berjalan dengan baik jika disiplin sekolah, kinerja guru, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat (stakeholder), dan fasilitas pembelajaran yang layak.

Tabel I

Realisasi Penerimaan Dana pendidikan MA Imam Muslim 3 Tahun Terakhir

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Dalam Juta Rupah) Tahun Pelajaran		
		2018/2019	2019/2020	2020/2021
Masyarakat	SPP	Rp 422.400.000,-	Rp 621.000.000,-	Rp 816.000.000,-

Sumber: Data Keuangan MA Imam Muslim Tahun 2020

Tabel II

Realisasi Kebutuhan Peserta Didik MA Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai

No	Jenis Kebutuhan Peserta Didik	Jumlah	Keterangan
1	Laboratorium Komputer	1	Baik
2	Buku Perpustakaan	4.567	Baik
3	Peralatan Olahraga	2	Baik
4	Lapangan Olahraga	1	Baik
5	Masjid (Menggunakan AC)	1 (AC 7 Unit)	Baik
6	Meja Belajar	145	Baik
7	Kursi Belajar	290	Baik

Sumber: Data Keuangan MA Imam Muslim Tahun 2020

Salah satu aspek yang paling menarik dari pembiayaan pendidikan adalah gaji guru. Meskipun unik, sekolah sering menghadapi masalah untuk membayar gaji guru ketika dana pendidikan tidak dimasukkan dengan benar. Pengadaan gaji guru tentunya diambil dari dana SPP yang diberikan peserta didik setiap bulannya. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk memeriksa bagaimana proses pembayaran SPP berjalan agar mereka dapat menentukan kapan gaji akan diberikan. Tidak mungkin gaji guru tidak dibayar pada tanggal yang disepakati bersama. Oleh karena itu, kepala madrasah harus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan jika dana yang masuk tidak memenuhi harapan. (Mesiono, Suswanto, Rahmat Rifai Lubis, 2021)

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah adalah sebagai berikut: a) kenaikan harga (naik harga); b) perubahan relatif

dalam gaji guru (naik gaji guru); c) perubahan dalam populasi dan prosentasi anak sekolah (naik populasi negeri); d) standar pendidikan yang meningkat (naik standar pendidikan); e) peningkatan usia anak yang meninggalkan sekolah (naik usia anak) dan f) peningkatan tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi.

ada beberapa jenis biaya pendidikan. Ada biaya langsung (direct cost); biaya tidak langsung (indirect cost); biaya pribadi (private cost); biaya masyarakat (social cost); uang tunai; dan biaya non-uang tunai. Sebagian besar orang Indonesia masih mengeluh tentang biaya pribadi, yang merupakan biaya yang harus dibayar oleh orang tua siswa.

Model pendekatan human capital adalah model pembiayaan pendidikan yang efisien dan dapat dikembangkan. Saat ini, satu-satunya peraturan yang disebutkan oleh pemerintah adalah Permendiknas

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Namun, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan terdiri dari: a) biaya satuan pendidikan; b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c) biaya pribadi siswa. Biaya satuan pendidikan juga terdiri dari: a) biaya investasi, yang terdiri dari 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan 2) biaya investasi selain lahan pendidikan; dan b) biaya operasi, yang terdiri dari 1) biaya personalia; dan 2) biaya nonpersonalia.(Ferdinand W.P, 2013)

Karena kebanyakan madrasah beroperasi secara swadaya, manajemen keuangan diperlukan. Untuk meningkatkan kualitas madrasah dan memenuhi harapan semua pihak yang terlibat, pengelolaan biaya yang profesional diperlukan untuk mendapatkan dana dan mendistribusikannya.

Setidaknya, ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan dalam manajemen pembiayaan tersebut. Pertama, perencanaan, yang mencakup proses menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, menentukan kekuatan, kelemahan, dan kelemahan, dan membuat rencana atau serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tahap akhir.

pelaksanaan, yang terdiri dari dua bagian: penerimaan dan pengeluaran. evaluasi dan pertanggungjawaban. Seringkali, evaluasi menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan dalam hal tujuan, prioritas, dan sumber daya yang tersedia. Pengawasan keuangan madrasah

harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara, mulai dari keputusan anggaran, pembelanjaan, perhitungan, dan penyimpanan barang. Penerimaan dan penggunaan uang harus dipertanggungjawabkan melalui laporan bulanan dan triwulan.(Usman, 2016)

Penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dilakukan dengan cara yang sistematis. Prosesnya dimulai dengan rapat pleno, menentukan sumber penerimaan dan pengeluaran madrasah, membuat RAPBM, mengusulkannya, melakukan revisi, dan akhirnya sampai pada tahap pengesahan.

Pembukuan akuntansi yang digunakan oleh MA Ribhul Ulum Kedungmutih dalam pencatatan keuangan adalah buku kas umum, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank, laporan keuangan, dan buku tabungan. Proses pengawasan keuangan dimulai dengan penerapan RAPBM sebagai standar pengawasan, di mana pihak internal dan eksternal melakukan pengawasan untuk menemukan kesalahan dalam laporan keuangan.

Dalam proses pertanggungjawaban keuangan yang diterapkan oleh MA Ribhul Ulum, laporan pertanggungjawaban keuangan dimulai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pemerintah dan yayasan dan selesai setelah laporan tersebut disetujui.

Sehubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, sekolah diharapkan dapat mengelola dan melaksanakan pembiayaan secara efisien, efektif, dan transparan sehingga tujuan sekolah dapat dicapai.(Nafisah et al., 2017)

SD Nurul Khoir menerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah dan sebagian dari pembiayaan SPP siswa/i yang dibayar oleh wali murid setiap bulan. Pembiayaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau prosedur pendidikan. Kedua, bendahara menggunakan buku pengelolaan keuangan umum untuk mencatat secara teratur dan terperinci tentang cara dana diterima dan diserahkan, termasuk dana dari pusat pendidikan (pemerintah).

Kepala sekolah dan bendahara memberikan kontribusi yang menunjukkan kerja sama yang baik. Ini terbukti dari fakta bahwa berbagai program di SD Nurul Khoir dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan mereka. Untuk menunjukkan transparansi atau keterbukaan, laporan penggunaan dana diletakkan di papan pengumuman sehingga semua orang dapat melihatnya, dan wali murid dan masyarakat diminta untuk memeriksa laporan penyelenggaraan pendanaan agar dana yang diterima hanya digunakan untuk program sekolah. menggunakan keuangan sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana penting yang dibutuhkan menunjukkan hal ini. (Muspawi & Lukita, 2023)

Perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah Suruh terdiri dari rapat kerja tahunan, membuat rancangan anggaran sesuai dengan tugasnya, mengajukan untuk disetujui oleh yayasan, membuat proposal, dan mengajukan kembali ke yayasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepala sekolah dan yayasan sangat selektif dalam menerima usulan program atau belanja modal baru yang sangat menguntungkan.

Sistem pembiayaan pendidikan dimulai dengan dana itu sendiri. Pembiayaan sekolah Islam Ar Rahmah Suruh berasal dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dana dari masyarakat, seperti iuran SPP dan dana bantuan atau hibah. Yang kedua adalah dana dari pemerintah, seperti dana BOS, yang digunakan untuk program pengembangan sekolah, belanja rutin (barang dan jasa), dan sebagainya.

Anggaran SD Islam Ar Rahmah Suruh digunakan untuk membiayai program sekolah dan membeli barang dan jasa. Program sekolah membutuhkan dana untuk berbagai pengembangan, seperti K13, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, dan penggalian sumber daya manusia, seperti pendelegasian guru untuk berpartisipasi dalam berbagai acara yang mendukung sumber daya manusia, seperti seminar dan pelatihan. Namun, pengeluaran untuk barang dan jasa digunakan untuk membiayai kegiatan kurikulum, kegiatan kepramukaan, rumah tangga, dan pendukung pembelajaran siswa. (Ekowati et al., 2020)

Perencanaan sistem pembiayaan pendidikan PP Darul Muttaqien Parung Bogor didasarkan pada gagasan untuk meningkatkan sumber pembiayaan yang ada saat ini, seperti beralih dari sistem manual ke sistem online atau untuk mempermudah update data secara langsung tanpa campur tangan dari luar sistem. Selain itu, penyusunan dimulai satu bulan sebelum tahun akademik 2018-2019. Dalam perencanaan sistem pembiayaan, kesiapan SDM sebagai stakeholder sekolah diuraikan.

Di PP Darul Muttaqien Parung Bogor, sistem pembiayaan pendidikan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, yaitu: a) Sistem pembiayaan

menggunakan jaringan internet, sehingga jaringan atau koneksi internet harus diutamakan; b) Perubahan sistem dari manual ke online dan penggunaan sistem Virtual Account (VA); c) Menyediakan sistem pembayaran tunai hanya sekali sebulan, dengan pihak dari Bank Perkreditan Rakyat Swasta (BPRS) datang secara manual atau dengan uang tunai; d) Pembiayaan saat ini hanya untuk pembayaran semester santri; e) Pembayaran bulanan kepada programmer untuk pengembangan sistem.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di PP Darul Muttaqien Parung Bogor, evaluasi sistem pembiayaan pendidikan dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti evaluasi sistem online dengan programmer, evaluasi operasi sistem Virtual Account (VA), evaluasi hasil kegiatan bulanan, evaluasi hasil kesiapan stakeholder, dan evaluasi sistem penilaian yang mencakup pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya. (Shunhaji et al., 2020)

Kepala sekolah merancang Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Lubuklinggau dengan melibatkan bendahara, dewan guru, pengurus, ketua komite, dan wali murid untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Perencanaan anggaran dibuat dalam bentuk uang karena uang pada dasarnya adalah pernyataan keuangan. Anggaran dibuat dalam bentuk yang disetujui bersama, diubah, dan disetujui untuk revisi.

Pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Lubuklinggau Anggaran pendidikan mencakup: (a) melakukan analisis potensi sumber dana internal dan eksternal; (2) mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memperkirakan sumber dana yang

dapat digali dan dikembangkan; (c) menetapkan sumber dana musyawarah, mendorong partisipasi masyarakat melalui komite sekolah; dan (d) menetapkan sumber dana untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Proses pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Kota Lubuk-linggau mencakup: (a) perencanaan anggaran dana; (b) pengelolaan dana; dan (c) evaluasi penggunaan dana melalui pengawasan kepala sekolah dan pengawasan internal oleh tim manajemen BOS Kota Lubuk-linggau. Laporan BOS dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahunan dengan format penyusunan.

Evaluasi dan pemantauan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Lubuk-linggau. Kegiatan ini juga melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kesalahan dan melacak tindakan bendaharawan yang menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang kepada pihak yang berwenang. Secara internal, Dinas Pendidikan Kota Lubuk-linggau hanya melihat pembukuan dan laporan pertanggung jawaban sekolah. Tidak ada pengawasan menyeluruh terhadap pembiayaan sekolah di SMP Negeri 2. Inspeksi torat rutin melakukan pengawasan eksternal;

Untuk membantu menyelesaikan masalah pembiayaan sekolah di SMP Negeri 2 Lubuklinggau, diminta Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau untuk merealisasikan dan mengajarkan pembuatan RAPBS kepada kepala sekolah dan bendahara secara bertahap, seperti yang dilakukan di masing-masing kecamatan. Namun, dengan dana terbatas, kepala sekolah diminta untuk menjadi kreatif dan mendapatkan dana dari berbagai sumber, salah satunya dengan melakukan kegiatan mendirikan

sekolah yang dapat menghasilkan pendapatan sekolah. (Yulianti, 2017)

Segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana sumber dana pendidikan dialokasikan, digunakan, dan ditanggung oleh institusi pendidikan disebut manajemen pembiayaan pendidikan. Mengetahui konsep dasar pembiayaan pendidikan adalah salah satu dari tiga kegiatan manajemen pembiayaan saat ini: penyusunan anggaran, pembiayaan, dan pemeriksaan. Dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan pendidikan meliputi tiga hal: budgeting (penyusunan anggaran), accounting (pembukuan), dan auditing (pemeriksaan). Mengetahui sumber pembiayaan sekolah. Dana dari masyarakat, unit pendanaan sekolah, dinas pendidikan, pemerintah pusat dan daerah, orang tua, dan dana bantuan luar negeri.

Perencanaan pembiayaan pendidikan mencakup: Mengidentifikasi aktivitas yang akan dilakukan selama periode anggaran; Mengidentifikasi sumber-sumber dalam bentuk uang, jasa, atau barang; Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena uang pada dasarnya adalah pernyataan keuangan; Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berkepentingan; dan Analisis sumber dana yang mungkin dilakukan secara internal dan eksternal; Identifikasi, mengelompokkan, dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan; Penetapan sumber-sumber melalui diskusi dengan orangtua selama tahun akademik; Komite sekolah mendorong partisipasi masyarakat; dan acara olahraga dan kesenian untuk mengumpulkan dana dengan menggunakan fasilitas sekolah.

Auditing adalah kegiatan pengawasan pembiayaan yang

berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang kepada pihak yang berwenang. Selain pengawasan, evaluasi juga dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa biaya sangat penting untuk penyelenggaraan pendidikan. Sekolah harus menetapkan jumlah dana yang akan digunakan untuk kegiatan pendidikan, yang biasanya ditetapkan dengan jelas pada rencana strategis sekolah (Rencana Strategis). (Imron, Moh, 2016)

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Darul Ulum Palangka Raya telah dibuat setelah rapat bersama yayasan, komite sekolah, dan orang tua.

Selain itu, pelaksanaan anggaran dan pembukuan pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 di lapangan menunjukkan bahwa anggaran dan pembukuan telah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan RAPBM yang dibuat.

Pengawasan penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua peserta didik di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 dilakukan secara langsung oleh kepala madrasah. Namun, pembuatan laporan oleh bendahara mengacu pada catatan pengeluaran yang dibuat sebagai bahan laporan, termasuk untuk mencatat pengeluaran dari dana yang tak terduga. (Soned et al., 2017)

Perencanaan pembiayaan pendidikan di kampus swasta menengah di Surabaya merupakan tahap pertama dalam manajemen pembiayaan. Tahapan-tahapan ini meliputi tahap pra-rencana, tahap perencanaan, tahap perumusan, tahap elaborasi, tahap implementasi,

dan tahap evaluasi, revisi, dan perencanaan kembali. Tahapan-tahapan ini digabungkan untuk menghasilkan RAB yang kemudian diserahkan kepada yayasan atau pengelola.

Setelah assessment yayasan diputuskan dalam rapat yayasan, RAB kemudian disahkan untuk dilaksanakan sesuai tahun anggaran. Salah satu faktor penting dalam peningkatan mutu adalah manajemen pembiayaan pendidikan. Jika manajemen pembiayaan pendidikan transparan dan akuntabel, stakeholder akan percaya, dan ini akan mendorong semua civitas akademika Tri Dharma Perguruan Tinggi di perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya untuk meningkatkan kualitas di bidang mereka masing-masing. (Anwar Abidin, 2017)

Pembiayaan adalah salah satu sumber daya yang secara langsung meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Pembiayaan telah digunakan secara langsung di institusi pendidikan, dan membutuhkan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah.

Salah satu elemen masukan instrumental, atau input, yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah pembiayaan pendidikan. Masalah pembiayaan sangat penting bagi sekolah karena semua aspek pendidikan terkait erat dengan aspek keuangan sekolah. Namun, kualitas sekolah tidak selalu terpengaruh secara langsung oleh masalah keuangan, terutama dalam hal sarana dan prasarana. (Hamidah, 2022)

Biaya Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya untuk melaksanakan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, serta untuk membeli peralatan pendidikan yang tercantum dalam RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah).

Selain itu, Madrasah Aliyah Al-Mansyuriyah mendapatkan dananya dari berbagai sumber, seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dana BOM (Bantuan Operasional Madrasah), dana BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal), dana IDB (Infak Dana Bulanan), sadaqoh, zariyah, hibah, dan wakaf dari orang tua dan donator.

Pencatatan dan pembukuan Madrasah Aliyah Al-Mansyuriyah sangat rinci, seperti yang ditunjukkan oleh buku pemasukan, buku kas, buku berita acara, dan SPJ yang dilengkapi dengan bukti transaksi. Perencanaan pembiayaan dimulai dengan RKAM. Selain itu, MA Al-Mansyuriyah melaporkan pengelolaan pembiayaan kepada wali siswa, kepala sekolah, guru, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah, semua diwakili oleh pengawas. (Sopwandin et al., 2019)

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMK Cendekia Madiun didanai secara bebas biaya oleh dana BOS, BPOPP, UNIPMA (yang berfungsi sebagai yayasan lembaga), koperasi, unit usaha lembaga pendidikan seperti perikanan dan sayur-sayuran, dan perbankan sekolah.

SMK Cendekia Madiun menggunakan manajemen pembiayaan pendidikan, yang mencakup tiga tahap pengelolaan keuangan: perencanaan, pengaplikasian, dan pengawasan. Studi ini hanya membahas model manajemen yang berpusat pada

fungsi manajemen.(Mushthofa et al., 2022)

Di SMPN 3 Mranggen, perencanaan pembiayaan (budgeting) dilakukan dengan membuat RAPBS. Sebagian besar dana untuk penyelenggaraan pendidikan berasal dari pemerintah melalui hibah blok RSBI dan BOS. Sekolah juga masih dapat meminta dana dari orang tua siswa.

Anggaran kegiatan dibuat dengan menggabungkan peraturan pemerintah dan kebutuhan sekolah. SMPN 3 Mranggen memiliki banyak guru selain kepala sekolah, bendahara, penanggung jawab program, dan pengurus komite dalam proses penyusunan rencana anggaran kegiatan sekolah.

Pencatatan dan pelaksanaan pembiayaan (accounting) di SMPN 3 Mranggen terdiri dari dua tugas: pencatatan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Bendahara, sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk menerima, mengeluarkan, dan menyimpan uang, bertanggung jawab untuk mencatat anggaran.

Pertanggungjawaban pembiayaan SMPN 3 Mranggen dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban pembiayaan. Pemeriksaan atau pengawasan pembiayaan dilakukan oleh Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten secara internal, dan BPKP dan BPK melakukan pengawasan eksternal. Selain itu, ada pengawasan tetap yang dilakukan secara teratur oleh kepala sekolah, yang bertanggung jawab atas manajemen seluruh sekolah.(Hayati, 2012)

Perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Syifaurrahman dimulai dengan menentukan program kerja yang akan

dilaksanakan tahun ajaran berikutnya, kemudian menentukan biaya pendaftaran siswa baru. Setelah itu, kepala madrasah dan bendahara sekolah membuat RKAM berdasarkan jumlah dan kebutuhan siswa selama satu tahun pembelajaran.

Pengawasan penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, sementara dana bukan dari pemerintah diawasi oleh yayasan dan komite madrasah. Pengawasan dilakukan setiap akhir semester sebelum pembuatan pelaporan pertanggungjawaban, dan fokus pengawasan adalah kondisi fisik madrasah dan kemajuan.

Laporan pertanggungjawaban dibuat secara rinci yang menguraikan semua laporan pemasukan dan pengeluaran selama satu semester pendidikan, dengan melampirkan semua bukti transaksi.(Sudrajat, 2019)

Segala sesuatu yang berkaitan dengan cara sumber dana pendidikan dialokasikan, digunakan, dan ditanggung jawab oleh institusi pendidikan disebut manajemen pembiayaan pendidikan. Terdapat tiga kelompok utama studi manajemen keuangan pendidikan: perencanaan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), dan pemeriksaan (auditing).

Salah satu sumber keuangan yang dapat membantu mengelola pendidikan dengan lebih baik adalah pembiayaan pendidikan. Dalam bahasa Inggris, istilah "biaya", "pendanaan", dan "belanja" umumnya digunakan untuk menggambarkan konsep biaya. Biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung.(Hariyanto Rangkuti, 2014)

D. Kesimpulan

Perencanaan pembiayaan pendidikan dimulai dengan menentukan program kerja yang akan dilaksanakan tahun ajaran berikutnya, kemudian menentukan biaya pendaftaran siswa baru. Setelah itu, kepala dan bendahara sekolah membuat RKAM berdasarkan jumlah dan kebutuhan siswa selama satu tahun pembelajaran.

Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, dana bantuan BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika dana BOS tidak mencukupi, kepala sekolah dapat menggunakan uang dari tabungan siswa atau uang partisipasi siswa. Jika dana BOS belum cair, kepala sekolah biasanya menggunakan uang dari tabungan siswa untuk menggantinya setelah dana BOS cair.

Pengawasan penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah harus dilakukan, sementara dana bukan dari pemerintah diawasi oleh yayasan dan komite sekolah. Pengawasan dilakukan setiap akhir semester sebelum pembuatan pelaporan pertanggungjawaban, dan fokus pengawasan adalah kondisi fisik sekolah dan kemajuan.

Laporan pertanggungjawaban dibuat secara rinci yang menguraikan semua laporan pemasukan dan pengeluaran selama satu semester pendidikan, dengan melampirkan semua bukti transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Abidin, A. (2017). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1>.

95

Ekowati, E. T., Sunandar, S., & Murniati, N. A. N. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Ar Rahmah Kecamatan Suruh. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.26877/jmp.v8i1.5368>

Ferdi W.P. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>

Hamidah, A. Z. (2022). KONSEP DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH. *Jurnal Mubtadiin*, 8(2), 214–235. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/562/219>

Hariyanto Rangkuti. (2014). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. *Pendidikan*, 1(2), 1–9. https://www.kompasiana.com/har_rangkuti/54f67ce4a33311b07d8b4ddc/manajemen-pembiayaan-pendidikan

Hayati, E. D. (2012). Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak. *Educational Management*, 1(2), 144–149. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman%0AMANAJEMEN>

Imron, Moh, J. (2016). Manajemen Pembiayaan Sekolah. *Al-Ibrah*, 1(1), 69–93. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/14/11>

Mesiono, Suswanto, Rahmat Rifai Lubis, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*,

- 13(1).
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/6244/5636>
- Mesiono, M., Siregar, M. F. S., & Saputra, I. B. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(02), 447–456.
<https://doi.org/10.30868/im.v4i02.1193>
- Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64–76.
<https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.46994>
- Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Lectura : Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99–110.
<https://doi.org/10.31849/lectura.v14i1.12237>
- Musthafa, L. A.-H. (2017). Model pembiayaan pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (Studi di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut). *Journal of Islamic Education*, 2(2), 221–248.
<https://ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie/article/view/78>
- Nafisah, D., Widiyanto, & Sakitri, W. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 788–797.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>
- Nursalimah, S. I. R. (2022). Pembiayaan Dan Efisiensi Pendidikan. *Pena Cendikia*, 5, xx.
<https://ejurnal.univalabuhanbatu.ac.id/index.php/pena/article/view/489/348>
- Shunhaji, A., N, A. M., & Desniati, P. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 18–39.
<https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.82>
- Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, 9(1), 25.
<https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>
- Sopwandin, I., Reza Atqia, M., Fathoni, N., & Hidayat, A. (2019). Madrasa Financing Management. *Tadbir Muwahhid*, 3(2), 195.
<https://doi.org/10.30997/jtm.v3i2.1963>
- Sudrajat, A. R. (2019). MADRASAH TSANAWIAH SATU ATAP (Penelitian di MTs SA Syifaurrehman Tasikmalaya) Asep Rahman Sudrajat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Manazhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 166–182.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36088/manazhim.v1i2.226>
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219.
<https://doi.org/10.19105/tadris.v11i2.1170>
- Yulianti, E. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP. *Manajer Pendidikan*, 11(4), 296–303.